

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji strategi Digital *Transnational Advocacy Network* (Digital TAN) yang dijalankan Greenpeace International dalam isu Arktik Rusia pasca penetapan status *undesirable organization* oleh pemerintah Rusia pada Mei 2023. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat tiga temuan utama yang dapat disimpulkan.

Pertama, pelarangan Greenpeace Rusia tidak melahirkan strategi digital yang sepenuhnya baru, melainkan mengubah fungsi, intensitas, dan skala dari strategi digital yang telah ada sebelumnya. Sebelum 2023, instrumen digital berperan sebagai pelengkap dari aksi fisik dan kehadiran organisasi di lapangan, sebagaimana terlihat dalam kampanye *Save the Arctic* yang mengandalkan ekspedisi kapal dan aksi langsung sebagai ujung tombak. Setelah akses fisik tertutup dan ruang sipil domestik dibatasi secara total, ruang digital bertransformasi menjadi instrumen utama, bahkan satu-satunya, dalam menopang keberlanjutan advokasi. Transformasi ini juga ditandai oleh pergeseran target audiens dari publik domestik Rusia ke publik global, termasuk pembuat kebijakan internasional, investor, media global, dan masyarakat sipil transnasional.

Kedua, dalam kerangka Digital TAN, Greenpeace mengoperasionalkan keempat strategi, yaitu *proselytizing*, *testing*, *conversing*, dan *facilitating* secara simultan dan saling terintegrasi. Strategi *proselytizing* diwujudkan melalui pembingkai ulang pelarangan sebagai ancaman terhadap tata kelola iklim

global, sekaligus mobilisasi jaringan kantor nasional untuk memperluas jangkauan narasi. Strategi *testing* terlihat dalam berbagai eksperimen komunikasi, mulai dari produksi dokumenter berskala internasional, pemanfaatan teknologi imersif, hingga kolaborasi dengan aktor budaya global. Strategi *conversing* dikembangkan melalui pembangunan ruang dialog dua arah, seperti reaktivasi akun Instagram Greenpeace Rusia dan penggunaan platform alternatif seperti Telegram sebagai ruang interaksi yang relatif lebih aman. Sementara itu, strategi *facilitating* menempatkan Greenpeace sebagai orkestrator jaringan, yang mengoordinasikan berbagai aktor lintas negara, termasuk jurnalis investigasi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menghasilkan tekanan advokasi yang bersifat kolektif dan multi-level.

Ketiga, efektivitas strategi Digital TAN yang dijalankan Greenpeace bersifat parsial dan kontekstual. Di ranah global, strategi ini berhasil mencatat capaian penting, seperti putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) pada Oktober 2025 yang menetapkan kewajiban prosedural baru bagi negara-negara dalam penilaian dampak iklim proyek energi, investigasi Unearthed yang mengungkap keterlibatan kapal pemecah es bertenaga nuklir terkena sanksi dalam rantai pasok gas Rusia, yang kemudian menciptakan tekanan reputasional terhadap perusahaan energi Eropa, serta aksi blokade di pelabuhan Belgia, Prancis, dan Belanda yang berhasil mengganggu logistik distribusi gas Rusia secara temporer.

Namun, di ranah domestik Rusia, strategi digital menghadapi keterbatasan struktural yang signifikan. Proyek-proyek energi Arktik seperti Arctic LNG 2

tetap berjalan dan bahkan mengalami ekspansi, dengan China menjadi penerima utama LNG yang terkena sanksi. Impor LNG Rusia ke Uni Eropa justru meningkat pada 2025, menunjukkan bahwa kebutuhan energi dan dinamika pasar tetap menjadi faktor dominan. Ruang sipil domestik semakin menyempit, dengan 25 organisasi lingkungan dipaksa tutup pada 2023 dan aktivis yang tersisa beroperasi secara “bawah tanah” (*underground*). Lebih mendasar, negara Rusia secara aktif merekonstruksi narasi tentang perubahan iklim, yaitu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai “peluang” ekonomi sehingga pesan advokasi Greenpeace tidak mendapatkan resonansi di tingkat publik domestik.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Digital TAN bergantung pada sejauh mana arena advokasi berada di luar kendali teritorial dan diskursif negara target. Strategi ini paling efektif di ruang-ruang yang relatif terbuka dan tidak sepenuhnya dikontrol oleh negara, seperti ruang digital global, forum hukum internasional, dan rantai pasok lintas negara. Sebaliknya, ketika advokasi berhadapan langsung dengan kedaulatan teritorial, kontrol informasi domestik, dan kepentingan strategis negara, kapasitas Digital TAN menjadi terbatas. Transformasi menuju advokasi digital tidak sepenuhnya menggantikan kebutuhan akan kehadiran fisik dan akses langsung di lapangan. Dalam konteks ini, advokasi digital berfungsi sebagai mekanisme produksi harapan dan kesinambungan perjuangan, yaitu sebuah pondasi penting bagi kemungkinan perubahan struktural di masa depan, namun bukan substitusi sempurna bagi advokasi konvensional.

4.2. Saran

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis yang telah diuraikan, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat ditarik, baik dalam ranah akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini membuka peluang kajian lanjutan mengenai efektivitas jangka panjang advokasi digital, khususnya dalam konteks negara dengan kontrol teritorial dan informasi yang tinggi. Studi selanjutnya dapat bersifat komparatif lintas rezim politik, mengkaji ketahanan (*resilience*) jaringan advokasi terhadap represi negara dengan membandingkan kasus Rusia, China, dan negara otoriter lainnya. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dinamika kuasa dalam jaringan advokasi transnasional, termasuk potensi dominasi aktor global terhadap suara lokal ketika kehadiran fisik di dalam negeri hilang. Penelitian tentang efektivitas jangka panjang dari strategi *testing* dan *conversing*, khususnya apakah peningkatan interaksi digital berkorelasi dengan perubahan kebijakan atau hanya sekadar amplifikasi wacana juga menjadi agenda riset yang relevan.

Secara praktis, temuan ini menegaskan beberapa rekomendasi bagi organisasi masyarakat sipil internasional yang beroperasi di negara dengan risiko represi tinggi. Pertama, organisasi perlu melakukan diversifikasi strategi dan tidak bergantung sepenuhnya pada kampanye digital. Meskipun ruang digital menjadi penting ketika akses fisik tertutup, kehadiran jaringan lokal di dalam negara target tetap krusial untuk menjaga legitimasi advokasi, meskipun harus beroperasi secara terbatas atau underground. Kedua, dokumentasi dan reproduksi memori kolektif melalui arsip digital perlu terus dilakukan untuk menjaga kesinambungan

perjuangan lintas generasi, terutama ketika narasi resmi negara cenderung menghapus atau mendelegitimasi sejarah aktivisme lingkungan. Ketiga, aliansi lintas sektor, yaitu termasuk dengan organisasi hak asasi manusia, akademisi, dan jurnalis investigasi menjadi semakin penting untuk memperluas framing isu lingkungan ke dalam kerangka keadilan global, tata kelola, dan akuntabilitas korporasi. Keempat, organisasi advokasi perlu mengembangkan strategi yang lebih adaptif dalam merespons dinamika geopolitik, mengingat konteks seperti invasi Ukraina terbukti mempercepat eskalasi represi terhadap organisasi berjejaring internasional.

Bagi pembuat kebijakan di tingkat internasional, temuan ini menggarisbawahi pentingnya melindungi ruang gerak masyarakat sipil sebagai bagian dari tata kelola global yang inklusif. Putusan ECtHR 2025 yang menetapkan kewajiban prosedural dalam penilaian dampak iklim menunjukkan bahwa forum hukum internasional dapat menjadi arena penting bagi advokasi lingkungan. Namun, efektivitas tekanan eksternal tetap terbatas jika tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat, terutama terhadap korporasi yang terlibat dalam rantai pasok energi dari negara dengan catatan pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan.